



Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan (*Studi pada Badan Pusat Statistik Wilayah Maluku*)

Jefry Gasperz

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Pattimura

This study aims to examine the effect of human resource competence, government internal control system and the use of information technology on the quality of financial statements of Central Bureau of Statistics in the Maluku Region. The population in this study are employees who handle accounting / financial reports on all accounting entities within the Central Bureau of Statistics in the Maluku Region. The research sample is the financial statements stylist includes PPK, PPSPM, financial staff, equipment, program development (planning) or administration as well as employees in the technical field who make financial reports. The data analyzed are primary data obtained through questionnaires. Total questionnaires distributed amounted to 57 and processed as many as 50 questionnaires (87.72%). The analytical method used is the multiple regression analysis method. Hypothesis testing results indicate that the competence of human resources and government internal control systems has a positive and significant effect on the quality of financial statements while the use of information technology has no effect on the quality of financial statements.

OPEN ACCESS

ISSN 2528-4649 (online)
ISSN 2338-4409 (print)

*Correspondence:

Keywords: Human Resource Competencies, Government Internal Control Systems, Utilization of Information Technology, Quality of Financial Statements.

Received: 10 Juni 2019

Accepted: 10 Juni 2019

Published: 4 September 2019

Citation:

JG (2019) Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan (*Studi pada Badan Pusat Statistik Wilayah Maluku*). *Jurnal Bisnis, Manajemen dan Perbankan*. 5:2. doi: <http://doi.org/10.21070JBMP.V512>

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan Badan Pusat Statistik di Wilayah Maluku. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang menangani akuntansi/laporan keuangan pada seluruh entitas akuntansi di lingkungan Badan Pusat Statistik di Wilayah Maluku. Sampel penelitian adalah penata laporan keuangan meliputi PPK, PPSPM, staf keuangan, perlengkapan, bina program (perencanaan) atau tata usaha maupun pegawai di bidang teknis yang membuat laporan keuangan. Data yang dianalisis adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Total kuesioner yang disebar berjumlah 57 dan diolah sebanyak 50 kuesioner (87,72 %). Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi berganda. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan sig-

nifikan terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Keywords: Human Resource Competencies, Government Internal Control Systems, Utilization of Information Technology, Quality of Financial Statements.

PENDAHULUAN

Tata kelola pemerintahan dalam sektor publik adalah proses tata kelola yang baik dengan melibatkan para pemangku kepentingan dalam berbagai kegiatan ekonomi, sosial politik, dan penggunaan berbagai sumber daya seperti alam, keuangan dan manusia. sumber daya untuk kepentingan rakyat dilakukan dengan berpegang pada prinsip keadilan, equity, kesetaraan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas (Nizam et al. 2018). Hal yang sama dikemukakan oleh Saffkaur et al. (2019), bahwa tata pemerintahan yang baik berkaitan erat dengan reformasi di bidang birokrasi, penegakan hukum, manajemen keuangan, peningkatan kualitas layanan publik, perubahan pola pikir dan pola budaya, pola sikap, pola tindakan, akan menjadi lebih produktif, efisien dan efektif. Lebih lanjut Sarbah and Xiao (2015) mengungkapkan bahwa aturan dan prinsip untuk meningkatkan profesionalisme merupakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance.

Pengelolaan yang baik ini perlu adanya sistem dan prosedur kelembagaan yang mendukung terciptanya kualitas dari laporan keuangan. Laporan keuangan disusun untuk memberikan informasi tentang posisi harta, utang, dan modal yang terjadi dalam rumah tangga perusahaan serta laba dan ruginya (Fransiska et al. 2016). Laporan keuangan yang baik harus bebas dari salah saji yang material, menyajikan seluruh informasi keuangan, lengkap, *full disclosure*, angka-angka dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditelusuri dan mampu menyajikan informasi keuangan yang dibutuhkan. Pemenuhan kriteria kualitas laporan keuangan menuntut pengelola keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan yang dipersyaratkan (UU Nomor 17, 2003) dan Indonesian Government Regulation No. 71 (2010) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Penilaian kualitas dari Laporan Keuangan mengacu pada opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga yang bertugas dalam pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan Negara. BPK akan mengeluarkan opini (pendapat) dalam bentuk Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (*Adversed*) dan Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer*). Auditor harus memberikan penjelasan mengapa opini tersebut diberikan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang (Setiyanti, 2012).

Fenomena terkini yang timbul dari beberapa pernyataan, berdasarkan informasi yang bersumber dari *www.finance.detik.com* pada 19 Juli 2018 bahwa Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan dari lembaga/institusi hanya sebagai tanda bahwa proses telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Oleh karena itu, predikat WTP tidak menjamin bahwa suatu institusi bebas dari tindakan korupsi, atau boros dalam menyusun anggaran. Lebih lanjut, Samosir and Setiyawati (2019) mengatakan bahwa untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, diperlukan kompetensi sumber daya manusia yang mendukung mereka yang memiliki kemampuan di tingkat individu, organisasi/lembaga, dan sistem untuk menjalankan fungsi atau wewenang mereka untuk mencapai tujuan mereka secara efektif dan efisien.

Berdasar beberapa pendapat di atas, maka terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan antara lain pengaruh penerapan dan pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pengetahuan pengelola, kompetensi aparatur, kompetensi sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan internal, sistem pengendalian intern pemerintah, pengelolaan keuangan daerah, reuiu laporan keuangan (Haliah, 2018).

BPK juga menemukan lebih dari satu masalah yaitu kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan keru-

gian Negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, penyimpanan administrasi, pemborosan dan ketidakefektifan. Data ikhtisar hasil pemeriksaan Semester II tahun 2015 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan bahwa dari pemeriksaan 704 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan lainnya terdapat 6.548 temuan yang memuat 8.733 masalah, yang meliputi 2.175 (25%) kelemahan SPI dan 6.558 (75%) masalah ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp11,49 triliun (RI, BPK, 2016).

Hasil pemeriksaan semester I tahun 2016 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari 696 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan lainnya terdapat 10.198 temuan yang memuat 15.568 masalah, meliputi 7.661 (49%) kelemahan SPI dan 7.907 (51%) masalah ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp44,68 triliun (RI, BPK, 2016).

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern pada BPS di Maluku berdasarkan pemeriksaan Inspektorat Wilayah 3 Badan Pusat Statistik RI terbagi atas dua yaitu kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan dimana penyelenggaraan penatausahaan barang persediaan dan buku publikasi masih belum tertib disebabkan terdapat selisih barang persediaan antara hasil pemeriksaan fisik dengan data aplikasi persediaan dan sebagian buku publikasi masih tersimpan dan belum didistribusikan kepada pihak-pihak terkait.

Kelemahan dalam sistem pengendalian internal dalam suatu organisasi menyebabkan adanya kesalahan-kesalahan dan resiko terhadap manajemen keuangan organisasi. Hal ini didukung oleh pendapat Eton, (2019) bahwa pengendalian sistem internal satu kejadian atau lingkungan namun merupakan serangkaian tindakan yang mempengaruhi keseluruhan aktivitas organisasi. Sistem pengendalian tersebut harus meresap dan melekat melalui cara manajemen menjalankan organisasi sehingga dapat memberikan jaminan yang layak (*reasonable assurance*) bagi organisasi untuk menemukan kesalahan dan mencegah resiko.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Kontijensi (Contingency Theory)

Teori kontijensi menunjukkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku organisasi dan menghasilkan beragam perilaku (Luthans and Stewart, 1977). Sejalan dengan ini penelitian Santander-astorga (2019) mengungkapkan praktek-praktek keberlanjutan dan inovatif adalah sejalan dengan faktor-faktor yang diungkap dalam teori kontijensi. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori kontijensi bahwa perilaku organisasi ditentukan oleh lingkungan dimana organisasi beroperasi (hotel), ukuran yang ditetapkan apakah besar ataukah sedang yang dimaksudkan untuk pengembangan yang berkelanjutan lingkungan teknologi yang digunakan dalam hotel tersebut dan beragam tipe klien yang memperbesar perhatian terhadap lingkungan tersebut terutama yang berkaitan dengan nilai budaya sosial.

Penerapan teori kontijensi dalam sistem informasi akuntansi erat kaitannya dengan efek teknologi, efek lingkungan dan efek struktur organisasi. Struktur organisasi termasuk didalamnya adalah sumber daya manusia. Kapasitas teknologi dari organisasi berhubungan dengan implementasi teknis dalam organisasi termasuk lingkungan teknologi. Lingkungan teknologi digunakan oleh organisasi dan implementasinya mempengaruhi praktek dan operasi organisasi seperti pelatihan dan keahlian sumber daya manusia yang dimiliki organisasi (Santander-astorga, 2019)

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi meliputi sejumlah atribut yang dilekatkan pada individu sebagai kombinasi pengetahuan, keahlian dan perilaku yang dapat meningkatkan kinerja (Prabawati, Meirinawati, and Aoktariyanda, 2018). Konsep tersebut menyiratkan adanya kemampuan perilaku aktivitas atau kegiatan operasional yang kompleks. Kompetensi ini juga digunakan dalam beragam lingkup manajemen sumber daya manusia yaitu seleksi individu, pengembangan, dan juga dalam perencanaan strategik serta kinerja manajemen.

Kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan sumber daya manusia untuk melakukan tugas dan tanggungjawab yang didelegasikan padanya dengan dukungan pengalaman, pelatihan dan Pendidikan yang cukup. Oleh karena itu kompetensi sumber daya manusia berkaitan dengan integrasi antara intelegensia dan kekuatan fisik yang senyatanya sifat dan perilaku sumber daya manusia tersebut ditentukan oleh keturunan dan lingkungan. Sedangkan kinerja setiap individu dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasan pribadi (Muda et al. 2017)

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Pengertian pengendalian intern menurut The Committee of Sponsoring Organization (COSO) yang dikutip dari Executive Summary (Foster, 2019) adalah sebagai berikut:

“Internal control is process by entity’s board of director, management and other personal designed to providereasonable assurance regarding achievement of objectives in the following categories: a. Realibility of inancial reporting, b. Effectiveness and efficiency of operation, and c. Compliance with applicable laws and regulations”.

The Committee of Sponsoring Organization juga memperkenalkan 5 (lima) komponen kebijakan dan prosedur yang dirancang dan diimplementasikan untuk memberikan jaminan bahwa tujuan pengendalian manajemen dapat dicapai. Kelima komponen pengendalian intern tersebut adalah:

1. Lingkungan Pengendalian (control environment)
2. Penilaian risiko manajemen (management risk assessment)
3. Sistem komunikasi dan informasi (information and communication system)
4. Aktivitas pengendalian (control activities)
5. Pemantauan (monitoring)

Adapun tujuan pengendalian intern adalah:

1. Terciptanya keandalan laporan keuangan,
2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas operasi organisasi,
3. Mendorong dipatuhi undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi oleh Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) mencakup adanya pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen, proses kerja secara elektronik dan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negeri. (Thompson et al. 1991) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi adalah pemrosesan, pengolahan dan penyebaran data yang didapat dari mengkombinasikan alat perangkat komputer dengan telekomunikasi.

Jurnali and Supomo (2002) menyebutkan pemanfaatan teknologi informasi adalah tingkat integritas teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi. Konstruksi pemanfaatan teknologi informasi diukur dengan indikator :

Perangkat yang merupakan indikator untuk menggambarkan kelengkapan yang mendukung terlaksananya penggunaan teknologi informasi meliputi perangkat lunak, keras dan sistem jaringan.

Pengelolaan data keuangan, merupakan indikator untuk menggambarkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data keuangan secara sistematis dan menyeluruh. Perawatan merupakan indikator untuk menggambarkan adanya jadwal pemerliharaan peralatan secara teratur terhadap perangkat teknologi informasi guna mendukung kelancaran pekerjaan.

Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun memiliki tujuan untuk menyediakan informasi keuangan mengenai suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai pertimbangan dalam pem-

buatan keputusan- keputusan ekonomi. Sedangkan kualitas laporan keuangan adalah informasi yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan mengandung unsur kelengkapan informasi, ketepatanwaktuan informasi, informasi yang andal atau dapat dipercaya serta dapat dibandingkan dan kelengkapan informasi pada laporan keuangan (Fransiska et al. 2016).

Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 (Indonesian Government Regulation No. 71 2010) menyatakan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan tipe penelitian eksplanasi yaitu penelitian asosiatif dimana penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan. Sampel dalam penelitian ini adalah penata laporan keuangan yang meliputi: PPK, PPSPM, staf keuangan, perlengkapan, bina program (perencanaan) atau tata usaha maupun pegawai di bidang teknis yang menangani akuntansi/pelaporan keuangan. Alasan menggunakan pegawai yang berhubungan dengan akuntansi/pelaporan keuangan adalah karena mereka bertanggung-jawab dan terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses menghasilkan laporan keuangan.

populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang menangani akuntansi/laporan keuangan pada entitas akuntansi di lingkungan Badan Pusat Statistik wilayah Maluku yang berjumlah 11 satuan kerja yang terdiri dari 9 (sembilan) kabupaten, satu kota dan satu provinsi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sampel jenuh, dengan semua anggota populasi menjadi sampel yaitu yang berjumlah 57 orang namun hanya 50 orang penata laporan keuangan yang tersebar pada BPS Wilayah Maluku yang dapat dijadikan sampel karena 7 orang penata laporan keuangantidak mengisi kuesioner secara lengkap.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda pada tabel 1 dibawah menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki t hitung 2,235 > t tabel 2,013 dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,124. Nilai signifikansi dari kompetensi sumber daya manusia adalah 0,030 < 0,050 dengan demikian maka keputusannya adalah H_0 ditolak dan H_a diterima. Dari hasil ini menunjukkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan BPS di wilayah Maluku. Nilai koefisien regresi yang positif menunjukkan bahwa jika semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia maka akan semakin tinggi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

[Tabel 1. Hasil Uji Regresi LB]

Hasil uji hipotesis ke dua menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah memiliki t hitung 5,242 > t table 2,013 dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,462. Nilai signifikansi dari sistem pengendalian intern pemerintah adalah 0,000 < 0,050 dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya variabel sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan BPS di wilayah Maluku. Nilai koefisien regresi yang positif menunjukkan bahwa semakin tinggi sistem pengendalian intern pemerintah maka akan semakin tinggi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Hasil pengujian hipotesis ke tiga menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki t hitung 0,418 < t table 2,013 dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,095 signifikansi dari pemanfaatan teknologi informasi adalah 0,678 > 0,050 dengan demikian H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti variabel pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan BPS di wilayah Maluku. Hasil ini menunjukkan bahwa belum semua BPS di wilayah Maluku memiliki tenaga operator computer dan perangkat pendukung yang handal karena keterbatasan dana untuk memenuhi kebutuhan akan sumber daya

manusia yang berkualitas, perangkat keras yang belum memenuhi syarat teknis serta perangkat lunak yang belum terintegrasi. Hambatan lainnya adalah kurangnya komitmen dari atasan untuk mengembangkan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan.

Secara teoritis, penelitian ini berguna bagi pengembangan akuntansi sektor publik khususnya yang berkaitan dengan determinasi kualitas laporan keuangan berupa kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi. Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dan untuk mendorong arah riset akuntansi sektor publik (pemerintahan) dalam menganalisis lebih lanjut mengenai variabel lainnya yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah.

KESIMPULAN

Dari pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pusat Statistik Wilayah Maluku. Kemudian sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Badan Pusat Statistik Wilayah Maluku. Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Badan Pusat Statistik Wilayah Maluku.

SARAN

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dapat dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan bagi para penata laporan keuangan. Adanya pembenahan sistem pengendalian intern melalui pembuatan surat keputusan tentang standar pelayanan minimum. Selain itu, dapat menggunakan kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel moderating dalam mengukur pengaruh SPIP dan pemanfaatan teknologi informasi karena sistem pengendalian intern pemerintah maupun pemanfaatan teknologi dibutuhkan sumber daya manusia dalam mengelola, menjalankan atau menggerakkan hal tersebut.

IMPLIKASI

Penelitian ini berimplikasi pada pembenahan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan penata laporan keuangan. Adanya pembenahan sistem pengendalian intern melalui pembuatan surat keputusan tentang standar pelayanan minimum menggantikan nota dinas yang dikeluarkan. Dengan demikian, laporan keuangan yang dihasilkan semakin berkualitas dan dapat kembali meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

REFERENSI

- Eton, Dr. Marus. 2019. "Internal Control and Budget Implementation in Kabale District Uganda." *International Journal of Science and Research (IJSR)* 8 (1): 815–21.
- Foster, Philip L. 2019. "COSO INTERNAL CONTROL – INTEGRATED FRAMEWORK : A n I M p l e m e n T a t i o n G u I d e F o r T h E," no. January.
- Fransiska, Neco, Aris Eddy Sarwono, Dewi Saptantinah, Puji Astuti, Fakultas Ekonomi, Universitas Slamet, Riyadi Surakarta, et al. 2016. "SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN," 323–31.
- Haliah, Nirwana dan. 2018. "Determinant Factor of the Quality of Financial Statements and Performance of the Government by Adding Contextual Factors." <https://doi.org/10.1108/AJAR-06-2018-0014>.
- Indonesian Government Regulation No. 71. 2010. "Concerning Issuance of Indonesian Governmental Accounting Standards: Accrual-Based Accounting." *Peraturan Pemerintah*.

- Jurnali, Tedy, and Bambang Supomo. 2002. "Pengaruh Faktor Kesesuaian Tugas-Teknologi Dan Pemanfaatan TI Terhadap Kinerja Akuntan Publik." Yogyakarta: JRAI.
- Luthans, Fred, and Todd I Stewart. 1977. "A General Contingency Theory of Management." Muda, Iskandar, Deni Yuwilia Wardani, Erlina, Azhar Maksum, Ade Fatma Lubis, Rina Bukit, and Erwin Abubakar. 2017. "The Influence of Human Resources Competency and the Use of Information Technology on the Quality of Local Government Financial Report with Regional Accounting System as an Intervening." *Journal of Theoretical and Applied Information Technology* 95 (20): 5552–61.
- Nizam, Ahmad, T Meldi Kesuma, Iskandarsyah Madjid, and Ridha Siregar. 2018. "The Role of Good Government Governance Principles in Enhancing the Performance of Public Organization in Aceh , Indonesia" 292 (Agc): 731–38.
- Prabawati, I., Meirinawati, and T. Aoktariyanda. 2018. "Competency-Based Training Model for Human Resource Management and Development in Public Sector." *Journal of Physics: Conference Series* 953 (1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/953/1/012157>.
- RI, BPK. 2016. "Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2016," no. 2.
- Safkaur, Otniel, Nunuy Nur Afiah, Sugiono Poulus, and Muhammad Dahlan. 2019. "The Effect of Quality Financial Reporting on Good Governance" 9 (3): 277–86.
- Samosir, Maralus, and Hari Setiyawati. 2019. "The Effect of Competence of Human Resources and the Use of Information Technology on the Quality of Financial Report With Internal Control System and Organizational Commitment As Moderation Variable." *International Journal of Advanced Research* 6 (12): 517–25. <https://doi.org/10.21474/ijar01/8168>.
- Santander-astorga, Paulina. 2019. "Green Practices in Hospitality : A Contingency Approach," 1–24.
- Sarbah, Alfred, and Wen Xiao. 2015. "Good Corporate Governance Structures : A Must for Family Businesses," no. January. <https://doi.org/10.4236/ojbm.2015.31005>.
- Setiyanti, Sri Wiranti. 2012. "Jenis-Jenis Pendapat Auditor (Opini Auditor)." *JURNAL STIE SEMARANG, Edisi Juni* 4 (2): 19–28.
- Thompson, By Ronald L, Christopher A Higgins, Canada Na, and Jane M Howell. 1991. "Personal Computing : Toward a Conceptual Model of Utilization," no. June 1989: 125–43.
- UU Nomor 17, 2003. 2003. "Presiden Republik Indonesia," hal.1-40.
- Winidyaningrum, Celviana, and Rahmawati. 2010. "Pengaruh Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi." Akuntansia.com.

Conflict of Interest Statement: The author declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2019 Author. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution

License (CC BY). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms.